

Peningkatan Kompetensi Guru SMK dalam Membentuk Sumber Daya Manusia Unggul di Institusi Pemerintahan

Nuramalia Hasanah¹ Ahmad Fauzi² Indah Mulyasari³

¹ Universitas Negeri Jakarta

² Universitas Negeri Jakarta

³ Universitas Negeri Jakarta

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: August 2019

Accepted: October 2019

Published: December 2019

Keywords:

Local Government Accounting, Vocational Teachers, Village Finance

Vocational education is intended to provide mid-level skilled workers. This community service activity aims to provide skills for all teachers, especially to prepare vocational graduates who play an active role in producing accounting operators to meet the needs of administrative staff. So that graduates can be absorbed in local and village governments. The implementation method was carried out at SMKN 51 in collaboration with the East Jakarta MGMP TEAM 2 in order to improve teachers' understanding of the local government accounting cycle so that they could do the financial recording and financial reporting at government agencies. These activities include 1) understanding of government budgets and supporting documents, 2) government accounting cycles, 3) recording and reporting of local government finances and practice materials, 4) recording and reporting of local government finances and the practice of making village financial reports. The results achievements of this activity are 1) The teachers increased their understanding knowledge of the government accounting cycle, 2) the teachers have skills in recording and reporting of financial statement for local and village governments, 3) mastery of using information technology for financial reports of local and village governments, 4) supported by the provision of facilities and infrastructure activities.

How to cite:

hasanah, nuramalia. (2019). Peningkatan Kompetensi Guru SMK dalam Membentuk SDM yang Unggul di Institusi Pemerintahan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 3(2), 333 - 347. <https://doi.org/10.21009/JPMM.003.2.12>

* Corresponding Author.
Nuramalia@unj.ac.id (Nuramalia Hasanah)
fauzifeunj@gmail.com (Ahmad Fauzi)

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Perkembangan pembangunan di Indonesia sudah mencapai daerah hingga pedesaan. Tuntutan dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembangunan tersebut menjadi suatu keniscayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, kebutuhan untuk akuntan pemerintah menjadi semakin meningkat. Sekolah menengah kejuruan, sebagai salah satu institusi penghasil tenaga kejuruan mengembangkan kurikulum akuntansi pemerintahan dalam menyikapi kebutuhan tenaga kejuruan yang memahami tata laksana pembukuan pemerintah khususnya ditingkat pemerintah daerah dan desa.

Pengembangan kurikulum akuntansi pemerintah di Sekolah Menengah Kejuruan menuntut Bapak/Ibu guru dibidang akuntansi memahami materi dan silabus. Pada saat ini guru-guru di Indonesia masih belum banyak yang memahami kurikulum ini dan belum mendapatkan pembekalan mengenai pelaksanaan kurikulum ini, padahal mereka harus mengimplementasikan kurikulum ini dalam mata pelajaran akuntansi pemerintah pada tahun ajaran 2018/2019 . Disamping itu juga belum cukup tersedianya buku ajar bagi para Guru untuk menyampaikan materi, hal ini menambah masalah yang dihadapi Guru-guru pengampu mata pelajaran akuntansi, khususnya akuntansi pemerintah.

Universitas Negeri Jakarta sebagai institusi pendidikan melaksanakan kegiatan tridarmanya melalui salah satu program pemberian pemahaman kepada masyarakat

tentang penerapan kurikulum. Program ini dilaksanakan di Musyawarah Guru Mata (MGMP) Pelajaran Akuntansi di Jakarta Timur, karena faktanya menunjukkan Guru-guru SMK pengampu mata pelajaran akuntansi, khususnya di DKI baru mengimplementasikan mata pelajaran baru ditahun 2018 yaitu mata pelajaran akuntansi pemerintah, bahkan mayoritas guru SMK di DKI belum mengikuti pelatihan mengenai materi ajar mata pelajaran ini. Melihat potensi ini, kami melaksanakan pengabdian pada masyarakat di MGMP Akuntansi Jakarta Timur.

Kegiatan pengabdian Masyarakat berupa pelatihan Implementasi Kurikulum Mata Pelajaran Akuntansi Pemerintah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka memaksimalkan hasil yang diharapkan dari kegiatan dengan strategi penyelenggaraan yang tepat. Pengetahuan akan tentang pemahaman akuntansi pemerintah di kalangan Guru SMK, khususnya yang mengajar mata pelajaran akuntansi, wajib dipahami agar harapan SMK sebagai penghasil tenaga kerja kejuruan salah satunya dibidang bisnis dan produktif dapat tercapai. Pelaksanaan reformasi keuangan di pemerintah dan implementasi dana desa, harus di dukung oleh tenaga akuntan yang baik dalam rangka pertanggungjawaban keuangan. Akuntansi pemerintah merupakan proses pendokumentasian, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah. Reformasi keuangan

pemerintah dimulai dengan munculnya undang-undang undang keuangan negara yang mewajibkan pemerintah untuk menyusun laporan keuangan. Pada awalnya, akuntansi pemerintah baru diimplementasikan pada pemerintah pusat saja, seiring dengan kebutuhan akuntabilitas keuangan pemerintah, akuntansi pemerintah berkembang ke pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Kegiatan proses penyusunan laporan keuangan pemerintah tidak hanya membutuhkan sistem yang baik, namun juga membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Sekolah menengah kejuruan, khususnya bidang bisnis dan produktif menjadi salah satu lembaga yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Guru SMK mata pelajaran akuntansi sebagai tenaga pengajar yang menghasilkan calon-calon tenaga administrasi keuangan negara, haruslah memiliki pemahaman yang integral tentang akuntansi pemerintah agar tujuan terciptanya sumber daya yang handal tersebut dapat tercapai.

Kegiatan Pelatihan berupaya untuk memberikan pengetahuan tentang materi ajar akuntansi pemerintahan di SMK dalam upaya meningkatkan kemampuan Guru SMK mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang akan terlibat dalam keuangan Daerah dan Desa. Kegiatan ini mengarahkan guru-guru SMK Mapel Akuntansi Pemerintah memahami materi-materi yang relevan yang menjadi bahan ajar dan juga mendapatkan bimbingan dan arahan dalam implementasi pembelajaran Mapel ini di sekolah menengah kejuruan. Dari

kegiatan ini diharapkan para peserta setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini akan memiliki ketrampilan dan pemahaman dalam mengajar mata pelajaran akuntansi pemerintah.

Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Sebagian besar guru (75%) yang mengajar di SMK belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau workshop untuk memahami kompetensi umum dan kompetensi inti mata pelajaran akuntansi pemerintah.
- b. Sebagian besar guru yang mengajar bidang studi akuntansi belum memahami akuntansi pemerintah padahal pencapaian guru dengan pemahaman akuntansi pemerintah yang sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan untuk mentransfer ilmu melainkan lebih dari semua itu, karena sebagai guru haruslah bisa diguru dan ditiru.
- c. Pemahaman kompetensi umum dan kompetensi dasar materi pelajaran akuntansi pemerintah dalam proses pembelajaran sehingga dapat menghasilkan suatu konsep pemahaman yang memadai.
- d. Kompetensi guru memahami cara cerdas dalam menyampaikan materi pembelajaran akuntansi pemerintah sehingga dapat mempersiapkan sumber

daya manusia yang handal ketika lulus nanti

- e. Keinginan untuk melakukan perencanaan pembelajaran yang mempunyai kecerdasan dalam mengelola pengetahuan akuntansi pemerintah sangatlah penting bagi semua guru SMK sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses pentransferan ilmu ke anak didiknya..
- f. Catatan yang komprehensif dapat dijadikan evaluasi untuk memprediksi proses pembelajarannya sehingga dapat dipahami oleh peserta didik dan menjadikan mereka sebagai tenaga administrasi yang siap terjun di lapangan ketika lulus nanti.

Tujuan dan Manfaat

Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan PKM ini bertujuan dan bermanfaat untuk:

- a. Peningkatan pemahaman guru SMK khususnya pengampu mata pelajaran akuntansi dapat memahami kompetensi Dasar dan Kompetensi inti materi akuntansi pemerintah.
- b. Para guru pengampu mata pelajaran akuntansi pemerintah dapat menyiapkan bahan ajar yang dapat dipahami oleh peserta didik dalam hal pengetahuan dan praktek.
- c. Peningkatan kemampuan guru dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan akuntansi pemerintah daerah dan desa

KAJIAN TEORITIK

Undang-Undang yang baru saja dikeluarkan tentang Desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat di terima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa akan meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permen No. 113 Tahun 2014.

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa di antaranya adalah: masyarakat desa, perangkat desa, Pemerintahan daerah dan Pemerintahan pusat.

Laporan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa:

1. Anggaran.
2. Buku kas.

3. Buku pajak.
4. Buku bank.
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Permendagri No. 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Berdasarkan peraturan tersebut, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berikut adalah kegiatan pengelolaan keuangan desa yaitu :

a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
- Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling

lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk di evaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
- Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota mem-

batalan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

- Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa tersebut.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desan yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- Pengaturan jumlah uang dalam kas desa

ditetapkan dalam peraturan Kabupaten/Kota.

- Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan Lampiran bukti transaksi.
- Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- Pembayaran yang telah dilakukan akan

dicatat bendahara.

- Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, Ardi Hamzah (2015). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 laporan pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan anatau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu

buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

d. Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:

a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan.

2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.

3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

e. Pertanggungjawaban

Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban real-

isasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembayaran. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

- format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Desa yang masuk ke desa.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

f. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam kegiatan ini yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan keuangan desa.

g. Laporan Keuangan Desa

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi dan misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggung jawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Laporan keuangan desa yang disajikan dalam buku ini adalah:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan anatau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

3. Buku Kas Harian Pembantu

Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan berhubungan dengan kas saja.

4. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

5. Buku Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

6. Buku Inventaris Desa

Buku Inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum dalam mencatat barang.

7. Buku Persediaan

Buku Persediaan adalah buku yang

mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal dari pembelian dan pemberian.

8. Buku Modal

Buku Modal/ ekuitas adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan dana hibah yang mengalir ke desa.

9. Buku Piutang

Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harta desa yang timbul karena terjadinya transaksi penualan/ sewa menyewa pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/ badan usaha.

10. Buku Hutang/ Kewajiban

Buku Hutang/ Kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa.

11. Neraca

Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuk dari transaksi-transaksi yang terjadi di desa.

12. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dalam anggrannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam

setahun.

MATERI DAN METODE

Kerangka Pemecahan Masalah

Metode pelatihan yang dilakukan dengan pendekatan *problem based learning*, yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepada para peserta sebagai orang yang langsung berkaitan dengan permasalahan. Agar materi dapat dipahami dengan baik tentu harus dipilih metode penyampaian yang tepat, untuk itu digunakan metode pembelajaran dengan pemecahan kasus dan tanya jawab. Metode ini akan merangsang peserta untuk tertarik dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan ini.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh para guru tersebut, maka solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

- a. Pelatihan pemahaman dan keterampilan mengenai gambaran umum akuntansi pemerintah terutama konsep dasar akuntansi pemerintah serta dokumen-dokumen yang disiapkan dalam penyusunan anggaran, bertujuan:
 1. Kemampuan kelompok sasaran meningkat 85% dalam bidang pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan anggaran pemerintah pusat maupun daerah.
 2. Kelompok sasaran mampu membedakan dan menyiapkan dokumen dalam penyusunan anggaran baik pemerintah pusat maupun daerah.
- b. Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang pencatatan dan pelaporan akuntansi

pemerintah daerah, dengan tujuan:

1. Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang pencatatan akuntansi pemerintah daerah sebesar 80%.
 2. Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 75%.
- c. Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang pencatatan dan pelaporan akuntansi desa, dengan tujuan:
1. Kemampuan kelompok sasaran meningkat dalam bidang pencatatan akuntansi desa sebesar 80%.
 2. Kemampuan kelompok sasaran meningkat dalam bidang pelaporan keuangan desa sebesar 75%.

Realisasi Pemecahan Masalah

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Hari ke – 1 (Anggaran Pemerintah)

Pada hari pertama yang perlu diberikan adalah pengenalan, motivasi dan materi dasar akuntansi pemerintah. Pengenalan ini akan membantu peserta didik untuk memahami beberapa istilah dalam akuntansi pemerintah dan teknik pembuatan anggaran pemerintah pusat dan daerah serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penyiapan anggaran. Memotivasi peserta didik adalah bagian yang sangat penting agar mereka selalu semangat, aktif dan inovatif dalam proses belajar. Selain itu motivasi ini bisa mengubah pikiran peserta didik kedepannya untuk bisa bekerja mandiri maupun mitra. Adapun uraiannya dari kegiatan hari ke-1:

Materi: Gambaran Umum Akuntansi Pemerintah (menjelaskan Konsep dasar akuntansi pemerintah dan Anggaran Pemerintah serta dokumen-dokumen yang terkait).

Proses Pembelajaran: peserta akan diajari teknik dasar pengenalan Akuntansi Pemerintah dan Anggaran dengan memberikan contoh kasus latihan.

Hari ke – 2 (pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah)

Materi: pengenalan tentang pencatatan dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah.

Proses Pembelajaran: peserta sebelumnya di jelaskan terlebih teori dan praktik pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hari ke – 3 (pencatatan dan Pelaporan Keuangan Desa)

Materi: pengenalan tentang pencatatan dan pelaporan keuangan Pemerintah desa.

Proses Pembelajaran: peserta sebelumnya di jelaskan terlebih teori dan praktik pencatatan dan pelaporan keuangan desa.

Adapun materi-materi pelatihan yang disampaikan di dalam kelas pada pelatihan ini adalah sebagai berikut :

1. Konsep Dasar Akuntansi Pemerintah
2. Anggaran Pemerintah beserta Dokumen Pendukungnya
3. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
4. Praktek Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
5. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Desa
6. Praktek Pencatatan dan Pelaporan

Keuangan Desa

Khalayak dan Sasaran

Kegiatan ini terkait dengan instansi pendidikan,yaitu Universitas Negeri Jakarta yang membiayai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen-dosen sebagai sebuah kewajiban atas Tridharma Perguruan Tinggi.

Khalayak dan sasaran dari ini adalah guru SMK pengampu mata pelajaran akuntansi yang ada wilayah Jakarta Timur dan Bekasi baik dari SMK Negri maupun swasta.

Metode

Transfer Ipteks yang dilakukan tim pada tiap tahapan yang diterima oleh mitra dilakukan melalui proses, mendengar, mengetahui, mencoba, mengevaluasi, menerima, meyakini dan melaksanakan yaitu :

1. Wawancara dengan ketua Tim MGMP yang memiliki kesulitan dalam pemahaman Akuntansi Pemerintah tetapi mempunyai kemampuan akuntansi dasar komersial.
2. Ceramah mengenai pengenalan akuntansi pemerintah dan anggaran pemerintah serta manfaatnya bagi guru.
3. Pengenalan konsep pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan desa secara mendalam kepada guru-guru melalui presentasi makalah dan kasus-kasus yang *up to date*.
4. Mengadakan diskusi untuk dapat menghasilkan timbal balik mengenai pencatatan dan pelaporan keuangan

pemerintah daerah dan desa, serta kendalanya dalam pemahaman materi tersebut.

Rancangan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan Program

Rancangan evaluasi dalam kegiatan ini ditetapkan untuk mengevaluasi terhadap penguasaan materi pelatihan oleh para guru, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan. Secara rinci rancangan evaluasi terhadap kegiatan ini disajikan di bawah ini. :

1. Mampu memahami dan membuat anggaran pemerintah daerah dan desa serta dokumen-dokumen pendukungnya.
2. Mampu mengerjakan pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah mulai dari proses pemahaman dokumen sampai dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Mampu mengerjakan pencatatan dan pelaporan keuangan desa mulai dari proses pemahaman dokumen sampai dengan pelaporan keuangan desa.
4. Mampu mengelola sumber daya baik di dalam dirinya sendiri maupun diluar dirinya untuk menghasilkan suatu nilai yang dapat meningkatkan kemampuan SDM SMK secara handal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SMKN 51 yang menjadi mitra dalam kegiatan Ipteks ini berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan. Dalam pencpelaporan keuangan pemerintah daerah dan desa, mitra berpartisipasi dalam pencatatan

dan pelaporan keuangan secara manual maupun komputerisasi. Sedangkan dalam kegiatan pelatihan, disamping berpartisipasi sebagai peserta, mitra berperan dalam menyediakan tempat pelatihan, ikut mensosialisasikan program pelatihan kepada guru-guru yang tergabung dalam MGMP Jakarta Timur 2. Sehingga partisipasi mitra sangat mendukung terhadap pelaksanaan program kegiatan Ipteks ini secara keseluruhan.

Peserta dari kegiatan PKM adalah guru SMK pengampu mata pelajaran akuntansi yang ada wilayah Jakarta Timur dan Bekasi , kurang lebih 32 orang. Peserta kegiatan ini didominasi oleh peserta perempuan, yang terdiri lebih dari 50% peserta. Mayoritas peserta berasal dari SMK swasta, karena SMK negeri di Jakarta Timur hanya 3 SMK yang memiliki prodi bisnis dan produktif da nada peserta juga yang hadir dari wilayah Jakarta Utara, Bekasi dan Tangerang. Sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman tentang akuntansi pemerintah daerah dan desa, karena pada saat perkuliahan materi yang diajarkan sebagian besar mengenai akuntansi pemerintah pusat.

Kegiatan ini terkait dengan instansi pendidikan,yaitu Universitas Negeri Jakarta yang membiayai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen-dosen sebagai sebuah kewajiban atas Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan PKM ini bermitra dengan MGMP Jakarta Timur, dilaksanakan di SMKN 51 diruang pertemuan lantai 2 yang beralamat di Jalan Bambu Apus Raya no. 40,Rt.06/Rw.03,

Bambu Apus Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13890.

Peserta kegiatan ini merupakan anggota MGMP Jakarta Timur dan beberapa Guru dari Bekasi yang mengampu mata pelajaran akuntansi pemerintahan, yang terdiri kurang lebih 43 orang Guru. Pelaksanaan PKM dilakukan selama tiga hari, yaitu mulai dari tanggal 8 Agustus hingga 10 Agustus, 2019. Waktu pelaksanaan kegiatan dari pukul 8.00 WIB- 15.00 WIB. Kegiatan PKM ini dapat berjalan lancar dari hari pertama hingga penutupan.

Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan hari pertama

Kegiatan hari pertama dimulai dengan sambutan oleh Ketua Program Studi Akuntansi SMKN 51 sekaligus membuka acara, dan Sambutan dari Perwakilan MGMP Jakarta timur. Kegiatan ini diikuti guru akuntansi pemerintahan se Jaktim dan sebagian dari Bekasi. kemudian dilanjutkan dengan materi yang disampaikan oleh Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak mengenai Anggaran Pemerintah. Pada siang hari setelah istirahat, materi dilanjutkan oleh Bapak Ahmad Fauzi, SPd. MAk workshop anggaran pemerintah dalam bentuk praktek pembuatan anggaran.

b. Kegiatan Hari Kedua

Kegiatan hari kedua langsung dimulai dengan materi akuntansi pemerintah daerah, yang disampaikan oleh Ibu Nuramalia Hasanah, SE, MAk. Pada siang harinya lakukan workshop akuntansi pemerintah daerah, berupa penyelesaian kasus-kasus pembukuan di

transaksi pemerintah daerah.

c. Kegiatan Hari Ketiga

Pada hari ketiga, diawali dengan materi Pengenalan Aplikasi Akuntansi Desa oleh Ibu Indah Mulyasari, SE, M.AK dan tim. Di akhir sesi diadakan penutupan dan evaluasi kegiatan. Penutupan dilakukan oleh Wakil Kepala Sekolah SMKN 51 Bidang Akademik.

Dari kegiatan ini dapat diketahui ada peningkatan kemampuan peserta untuk memahami akuntansi pemerintah. Disamping itu beberapa hal yang dievaluasi antara lain tentang materi, bahan ajar dan sarana prasarana. Dari hasil evaluasi mengenai materi diketahui mayoritas peserta merasa materi yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan, begitu juga waktu penyampaian dan latihan yang diberikan. Rata-rata jawaban kesesuaian materi yaitu 89,75% menganggap sudah sesuai. Dari hasil evaluasi mengenai material diketahui mayoritas peserta merasa bahan ajar, bahan tayang dan bahan latihan yang diberikan sudah sesuai. Rata-rata jawaban kesesuaian material yaitu 84,66% menganggap sudah sesuai. 100% peserta merasa bahan tayang yang diberikan sangat bermanfaat, meskipun untuk bahan latihan kepuasan peserta masih kurang, karena kendala waktu latihan yang terbatas.

Dari hasil evaluasi mengenai sarana dan prasarana diketahui mayoritas peserta merasa sarana dan prasarana yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan, begitu juga waktu penyampaian dan latihan yang diberikan, bahkan untuk sarana 100% peserta menjawab sesuai dan untuk prasarana 97%

menjawab sesuai. Rata-rata jawaban kesesuaian sarana dan prasarana yaitu 97% mengangap sudah sesuai.(data terlampir).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya peningkatan pemahaman guru SMK dalam memahami kompetensi Dasar dan Kompetensi inti materi akuntansi pemerintah.
- b. Para guru pengampu mata pelajaran akuntansi pemerintah dapat menyiapkan bahan ajar yang dapat dipahami oleh peserta didik dalam hal pengetahuan dan praktek.
- c. Peningkatan kemampuan guru dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan akuntansi pemerintah daerah dan desa.

Saran

Kegiatan pelatihan selanjutnya diharapkan :

1. Perbanyak contoh soal mengisi bukti-bukti transaksi untuk melakukan pencatatan, sehingga akan lebih paham dalam memahami materinya.
2. Dalam metode penyampaian materi lebih diperbanyak menggunakan metode studi kasus daripada metode ceramah, agar peserta dapat lebih paham terkait materi yang disampaikan.
3. Perlu pemahaman selanjutnya untuk sistem aplikasi keuangan desa.

4. Dibuatkan modul yang mudah dipahami sebagai bahan ajar untuk referensi guru dalam mengajarkan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Indra Bastian, (2001) *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Salemba: Jakarta.

Garis - garis besar program pembinaan SMK 2014

Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan DasarMenengah Nomor 251 /C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

Mardiasmo, (2002), *Akuntansi Sektor Publik*, Andy offset, Yogyakarta.

Rencana strategis Kementrian pendidikan dan kebudayaan 2010-2014

Revrisond Baswir (1998) *Akuntansi Pemerintahan*, BPFE, Yogyakarta

PP No 60 Tahun 2014 Tentang Realisasi pelaporan dana desa.

Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Laporan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indon

esia nomor 70 tahun 2013 tentang
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
SMK/Madrasah Aliyah Kejuruan

UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pen-
didikan Nasional

Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang
Desa.

UU No 17 tahun 2003 mengenai Keu-
angan Negara

UU No 1 tahun 2004 tentang Perbenda-
haraan Negara

Berikut syarat lengkap nyalon kades,[https://
www.wartabromo.com/2019/07/24/
berikut-syarat-lengkap-nyalon-kades-
boleh-ijazah-smp-hingga-baca-kitab-
suci-lho/](https://www.wartabromo.com/2019/07/24/berikut-syarat-lengkap-nyalon-kades-boleh-ijazah-smp-hingga-baca-kitab-suci-lho/)

Daftar kecamatan dan kelurahan di Indone-
sia,[https://id.wikipedia.org/wiki/
Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_I
ndonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Indonesia)